

| JENIS PERMASALAHAN | PERMASALAHAN                                                                                                                                                                                             | SOP PERBAIKAN DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama PNS           | Ketidaksesuaian Nama<br>(cakupan permasalahan yang umum terjadi adalah perbedaan huruf pada nama, tanda baca dan spasi pada nama yang tidak sesuai, dan gelar pendidikan yang masuk/tergabung pada nama) | <p>Instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah harus mengusulkan perbaikan nama PNS ke BKN Pusat dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Karpeg dilegalisir</li> <li>2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir</li> <li>3. Fotocopy SK Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS (SK 100%) dilegalisir</li> <li>4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir</li> <li>5. Fotocopy Ijazah CPNS (Ijazah yang tertera di SK CPNS/Ijazah yang digunakan terangkat CPNS</li> <li>6. Surat Usulan Perbaikan Data ditujukan kepada Kepala BKN</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        |
| Nama PNS           | Nama PNS tidak sesuai pada data SAPK BKN, namun terdapat ketidaksesuaian pula penulisan nama pada SK CPNS dan Ijazah CPNS (Ijazah yang digunakan terangkat CPNS)                                         | <p>Instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah melakukan perbaikan data pada SK CPNS terlebih dahulu dengan menerbitkan SK CPNS PERBAIKAN Setelah SK CPNS PERBAIKAN diterbitkan, dilanjutkan dengan instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah mengusulkan perbaikan nama PNS ke BKN Pusat dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Karpeg dilegalisir</li> <li>2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir</li> <li>3. Fotocopy SK Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS (SK 100%) dilegalisir</li> <li>4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir</li> <li>5. Fotocopy Ijazah CPNS (Ijazah yang tertera di SK CPNS/Ijazah yang digunakan terangkat CPNS</li> <li>6. Surat Usulan Perbaikan Data ditujukan kepada Kepala BKN</li> </ol> |
| NIP PNS            | Ketidaksesuaian Nip<br>(cakupan permasalahan yang umum terjadi adalah tanggal lahir pada NIP tidak sesuai dan kode jenis kelamin tidak sesuai)                                                           | <p>Instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah harus mengusulkan perbaikan NIP PNS ke BKN Pusat dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotocopy Karpeg dilegalisir</li> <li>2. Fotocopy SK CPNS dilegalisir</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                | <p>3.Fotocopy SK Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS (SK 100%) dilegalisir</p> <p>4.Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir</p> <p>5.Fotocopy Ijazah CPNS (Ijazah yang tertera di SK CPNS/Ijazah yang digunakan terangkat CPNS)</p> <p>6.Surat Usulan Perbaikan Data ditujukan kepada Kepala BKN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NIP PNS            | NIP PNS tidak sesuai pada data SAPK BKN, namun terdapat ketidaksesuaian pula penulisan NIP pada SK CPNS dan Ijazah CPNS (Ijazah yang digunakan terangkat CPNS) | <p>Instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah melakukan perbaikan data pada SK CPNS terlebih dahulu dengan menerbitkan SK CPNS PERBAIKAN</p> <p>Setelah SK CPNS PERBAIKAN diterbitkan, dilanjutkan dengan instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah mengusulkan perbaikan NIP PNS ke BKN Pusat dengan melampirkan :</p> <p>1.Fotocopy Karpeg dilegalisir</p> <p>2.Fotocopy SK CPNS dilegalisir</p> <p>3.Fotocopy SK Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS (SK 100%) dilegalisir</p> <p>4.Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir</p> <p>5.Fotocopy Ijazah CPNS (Ijazah yang tertera di SK CPNS/Ijazah yang digunakan terangkat CPNS)</p> <p>Surat Usulan Perbaikan Data ditujukan kepada Kepala BKN</p> |
| Gelar kependidikan | Ketidaksesuaian gelar kependidikan (gelar kependidikan berbeda dan gelar terbaru belum tercantum)                                                              | <p>Instansi pengelola kepegawaian baik pusat maupun daerah harus mengusulkan perbaikan gelar kependidikan PNS ke BKN Pusat dengan melampirkan :</p> <p>1.Fotocopy Karpeg dilegalisir</p> <p>2.Fotocopy SK CPNS dilegalisir</p> <p>3.Fotocopy SK Pengangkatan dari CPNS menjadi PNS (SK 100%) dilegalisir</p> <p>4.Fotocopy SK Kenaikan Pangkat Terakhir dilegalisir</p> <p>5.Fotocopy Ijazah terakhir dilegalisir Perguruan Tinggi/Universitas</p> <p>6.Fotocopy Surat Izin Belajar dilegalisir</p> <p>7.Dokumen Pangkalan Data Perguruan</p>                                                                                                                                                                                             |

|  |  |                                                                                                                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Tinggi (PDPT) memuat data PDPT PNS yang diusulkan<br>8.Surat Usulan Perbaikan Data ditujukan kepada Kepala BKN |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|